



KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KINERJA SEKRETARIAT UTAMA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pengukuran dan peningkatan kinerja, serta mewujudkan akuntabilitas kinerja yang lebih baik, perlu untuk menetapkan rencana kinerja di lingkungan Sekretariat Utama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Rencana Kinerja Sekretariat Utama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 4. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 349);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
 6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 930); dan
 7. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 933);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL TENTANG RENCANA KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Sekretariat Utama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Tahun 2025 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan bagi Sekretariat Utama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2025.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Februari 2025

SEKRETARIS UTAMA
BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD AQIL IRHAM

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum, Sumber Daya
Manusia, dan Humas



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL TAHUN 2025

RENCANA KINERJA SEKRETARIAT UTAMA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2025

NO	UNIT KERJA	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	INDIKATOR		TARGET
1	SEKRETARIS UTAMA	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi yang efektif dan akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi General		75
2	BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI	Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Kinerja Organisasi	a	Indeks Perencanaan Pembangunan	70
			b	Nilai Kinerja Anggaran	70
			c	Indeks Kualitas Kebijakan	75
			d	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	80
			e	Indeks Layanan Publik	3,5
			f	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	88
			g	Tingkat tindak lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	100%
			h	Persentase unit kerja yang diusulkan memperoleh predikat Wilayah Bebas	-

NO	UNIT KERJA	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	INDIKATOR		TARGET
				Korupsi (WBK) dan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	
			i	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern	33
3	BIRO HUKUM SUMBER DAYA MANUSIA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya kualitas layanan Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Hubungan Masyarakat	a	Indeks Sistem Merit	0,625
			b	Indeks Profesionalitas ASN	84,75
			c	Indeks Reformasi Hukum	60 (CC)
			d	Keterbukaan Informasi Publik	60
			e	<i>Engagement</i> (Tingkat interaksi) Halal dalam platform Sosial Media	1
4	BIRO UMUM DAN KEUANGAN	Meningkatnya Kualitas Layanan Umum, BMN, dan Keuangan	a	Opini Laporan Keuangan (WTP)	WTP
			b	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Baik
			c	Tingkat Digitalisasi Arsip	B
			d	Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP)	70%
			e	Indeks Pengelolaan Aset	2,5
			f	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Baik
			g	Persentase Tindak Lanjut Hasil	80%

NO	UNIT KERJA	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	INDIKATOR		TARGET
				Pemeriksaan (TLHP)	
			h	Nilai Kesimpulan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan	Efektif
5	INSPEKTORAT	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal	a	Tingkat Keberhasilan pembangunan Zona Integritas (ZI)	25
			b	Survei Penilaian Integritas (SPI)	66,3
			c	Persentase hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti	80%
			d	Persentase hasil Reviu dan Pemantauan yang diselesaikan	80%
			e	Persentase Hasil Evaluasi yang ditingkatkan nilainya	80%
			f	Persentase Hasil Audit yang ditindaklanjuti	80%
			g	Persentase Hasil Pengawasan lainnya yang dilaksanakan	75%
			h	Persentase Nilai Gratifikasi Unit Kerja	72%
			i	Persentase Pengaduan Pelanggaran yang diselesaikan	75%
			j	Nilai Kapabilitas APIP (IACM) dan SPIP	2
			k	Identifikasi Risiko yang	70%

NO	UNIT KERJA	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	INDIKATOR		TARGET
				dilakukan Tindakan Pengendalian	
			1	Hasil Pemeriksaan dan Rekomendasi Eksternal yang ditindaklanjuti	70%
6	PUSAT DATA DAN INFORMASI	Meningkatnya kualitas Data Dan Informasi	a	Tingkat implementasi kebijakan arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Baik
			b	Indeks Pembangunan Statistik	2,5
			c	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3
7	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA JAMINAN PRODUK HALAL	Meningkatnya Kualitas SDM JPH yang dikembangkan	a	Persentase SDM JPH yang meningkat kompetensinya	50

SEKRETARIS UTAMA
BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD AQIL IRHAM

Salinan sesuai dengan aslinya
AN PENYELENGGARA
UK HALAL REPUBLIK INDONESIA

Biro Hukum, Sumber Daya
Manusia, dan Humas



Indrayani
NIP. 197003211997021002